

## **PENDEKATAN EFISIENSI CSR DENGAN PEMBENTUKAN SEBUAH LEMBAGA NEGARA YANG MENGATUR DANA DAN PROGRAM-PROGRAM CSR**

### **ABSTRAK**

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan tidak saja dilaksanakan oleh perusahaan pemerintah tetapi juga oleh perusahaan swasta baik pada perusahaan besar, menengah dan UKM. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana pengaturan CSR mengenai kewajiban perusahaan Perseroan Terbatas (PT) melaksanakannya dalam tatanan hukum Indonesia? 2. Bagaimana pelaksanaan kewajiban perusahaan Perseroan Terbatas (PT) menerapkan CSR di Indonesia? 3. Bagaimana sebaiknya pengaturan kewajiban perusahaan seperti Perseroan Terbatas (PT), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan usaha lainnya melaksanakan CSR agar bermanfaat sesuai dengan CSR tersebut? Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Untuk mendalami peneliti mewawancarai enam perusahaan mengenai partisipasi program CSR mereka. Dari hasil penelitian diketahui bahwa 1. Pengaturan CSR mengenai kewajiban perusahaan Perseroan Terbatas (PT) melaksanakannya dalam tatanan hukum Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang tetapi ada 2 (dua) undang-undang yang mengatur CSR secara spesifik namun kedua undang-undang tersebut tidak konsisten terkait dengan sanksi 2. Pelaksanaan kewajiban perusahaan Perseroan Terbatas (PT) menerapkan CSR di Indonesia tidak dapat berjalan dengan baik dan maksimal karena beberapa sebab: a. Kendala dari pemberi CSR (perusahaan) seperti kurangnya komitmen perusahaan pada tanggung jawab sosial, b. Kendala dari wilayah (pemerintah daerah) yaitu banyak pemerintah daerah bekerja menjalankan roda pemerintahan disesuaikan dengan hasrat politiknya. c. Kendala dari pemanfaat CSR (masyarakat) yaitu tanggung jawab masyarakat yang kurang disiplin. Masyarakat pada umumnya lebih menyukai bantuan yang bersifat instan dan berbentuk materi atau barang. 3. Pengaturan kewajiban perusahaan Perseroan Terbatas (PT) melaksanakan CSR berikut program-program yang lebih efisien, tepat sasaran dan berkesinambungan yaitu dengan membentuk lembaga negara terintegrasi dengan kementerian sosial dan kementerian lingkungan hidup yang menyusun program dan mengatur dana masyarakat, hal ini sangat bermanfaat bagi perusahaan dengan skala kecil dan menengah yang pada umumnya belum memiliki data tentang program-program pemerintah dan kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan di daerah serta menjadi alat promosi dan komunikasi.

Kata Kunci : Efisiensi, CSR, Lembaga Negara

## **CSR EFFICIENCY APPROACH BY ESTABLISHMENT OF A STATE AGENCY REGULATING FUNDS AND CSR PROGRAMS**

### **ABSTRACT**

*The Company in carrying out its business activities must carry out social and environmental responsibility not only carried out by government companies but also by private companies in large, medium and SME companies. Inconsistencies about the concept of corporate social responsibility and existing legislation have not yet set the mechanism for implementing corporate social responsibility along with clear and firm sanctions for not doing CSR. Plus more detailed rules regarding CSR are delegated to local government regulations so that unconsciously a new polemic will emerge in reforming government policies. The problems in this study are: 1 How do CSR arrangements regarding the obligations of limited liability companies (PT) implement them in the Indonesian legal order? 2. How is the implementation of corporate obligations of Limited Liability Companies (PT) implementing CSR in Indonesia? 3. How should the regulation of corporate liabilities of a Limited Liability Company (PT) implement CSR along with programs that are more efficient, targeted and sustainable? This research uses empirical normative legal research that is legal research concerning the application of normative legal provisions (codification, law or contract) in action on any particular legal event that occurs in society. From the research results it is known that 1. CSR arrangements regarding the obligations of Limited Liability Companies (PT) implement them in the Indonesian legal structure are regulated in 2 (two) laws but the two laws are contradictory related to sanctions 2. The implementation of Limited Liability company obligations ( PT) implementing CSR in Indonesia cannot run properly and maximally due to several reasons: a. Obstacles from CSR providers (companies) such as lack of corporate commitment to social responsibility, b. Constraints of the region (local government), namely many local governments work to run the wheels of government tailored to political desires. c. The obstacle of the beneficiaries of CSR (community) is the responsibility of the people who lack discipline. The community in general prefers instant assistance in the form of materials or goods. 3. Regulations of corporate liability Limited Liability Companies (PT) implement CSR along with programs that are more efficient, targeted and sustainable, namely by establishing a state institution that manages public funds, this is very beneficial for small and medium scale companies that generally do not have data on government programs and the needs of the community and supporting development in the region as well as being a means of promotion and communication.*

*Keywords: Efficiency, CSR, State Institutions*